



Kementerian Kelautan dan
Perikanan

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
NIZAM ZACHMAN JAKARTA



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

ONE Team
RPS Nizam Zachman Jakarta

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga selesailah penyusunan Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025-2029.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tahun 2025-2029. Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program dan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta yang akan dilaksanakan langsung pelabuhan perikanan dengan mendorong peran aktif masyarakat perikanan di kawasan pelabuhan perikanan selama kurun waktu tahun 2025–2029.

Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tahun 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan bagi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dalam menyusun rencana kerja program dan kegiatan tahunan dalam pembangunan perikanan tangkap selama lima tahun yang berisikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta penganggaran untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta baik untuk lingkup pelabuhan perikanan maupun stakeholder di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta serta pihak-pihak lain yang terkait.

Jakarta, 10 Januari 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera
Nizam Zachman Jakarta



Asep Saepulloh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang akan menjadi dasar bagi Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2025, berfokus pada pencapaian pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. RPJMN ini juga menekankan pada prioritas nasional dalam Asta Cita, yang meliputi peningkatan SDM, pertumbuhan berkelanjutan, dan penurunan kemiskinan.

Hal-hal yang menjadikan poin penting pada RPJM 2025-2029 di Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain :

- Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP pada RKP 2025 antara lain adalah produksi perikanan sebesar 24,58 juta ton, nilai tukar nelayan pada kisaran 105-108, pertumbuhan PDB perikanan pada kisaran 4-6 persen, nilai ekspor hasil perikanan sebesar USD 6,25 miliar, dan produksi garam sebesar 2,25 juta ton.
- RPJMN 2025-2029 juga menekankan pada pengembangan SDM, termasuk SDM yang berkualitas dan dapat diandalkan dalam pengembangan IPTEK.
- KKP berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran negara guna mendukung terwujudnya laut sebagai masa depan bangsa, ujar KKP dalam RKA-KL 2025.

Sementara rencana jangka panjang yang disusun dalam pembangunan sektor perikanan tangkap yang mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan, program, hingga kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan berdaya saing. Beberapa poin yang terkandung pada Renstra Perikanan Tangkap, antara lain :

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor perikanan tangkap, seperti nelayan, pekerja perikanan, dan pengelola perikanan, melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan.
- Penerapan PIT berbasis kuota untuk pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan efisien.
- Peningkatan kualitas dan kapasitas pelabuhan perikanan untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.
- Pengembangan model budi daya perikanan di darat, laut, dan pesisir untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya.
- Penguatan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan perikanan tangkap, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan dan pengelolaan sumber daya ikan.
- Meningkatkan peran sektor perikanan tangkap dalam mendukung ketahanan pangan nasional, termasuk melalui peningkatan produksi ikan dan diversifikasi produk perikanan.

B. Kondisi Umum

Sasaran strategis pembangunan perikanan tangkap secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Secara spesifik, sasaran strategis ini dapat mencakup peningkatan produksi dan produktivitas perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan, serta pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam sektor perikanan. Pencapaian sasaran strategis selanjutnya direpresentasikan melalui pencapaian indikator kinerja utama serta dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas.

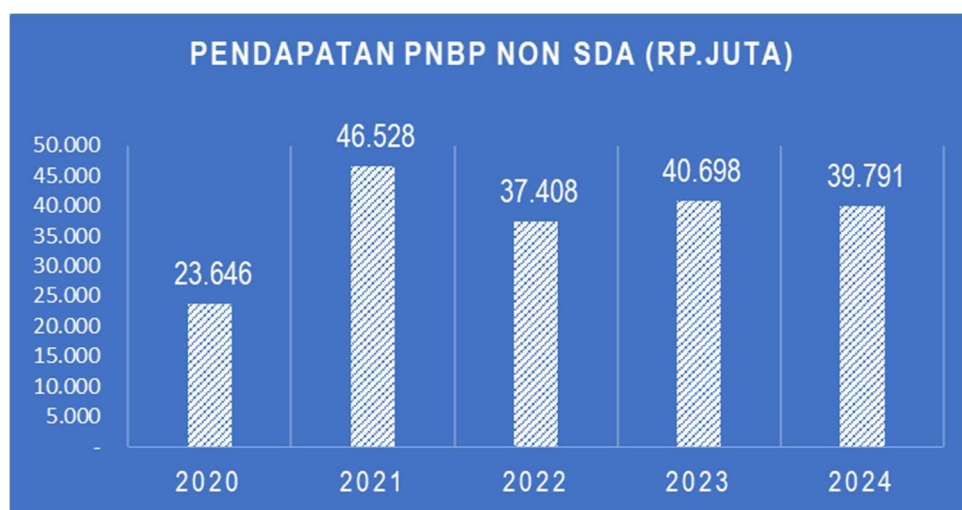
Perkembangan kondisi umum pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non SDA

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor

kelautan dan perikanan. Merupakan nilai PNBP non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada KKP.

Nilai pendapatan PNBP Non Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan di PPS Nizam Zachman Jakarta pada kurun waktu 5 tahun terakhir rata-rata mengalami peningkatan sebesar 20,9% pertahun. Secara rinci, perkembangan nilai PNBP Non SDA di PPS Nizam Zachman Jakarta adalah sebagai berikut :



2. Volume Produksi Perikanan Tangkap

Jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah.

Volume produksi perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta pada kurun waktu 5 tahun terakhir rata-rata mengalami peningkatan sebesar% pertahun. Secara rinci, perkembangan volume perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta adalah sebagai berikut :

3. Jumlah Kapal Berpangkalan di PPS Nizam Zachman Jakarta

Berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan No. 33 Tahun 2021, pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Jumlah kapal yang berpangkalan dan memanfaatkan kolam PPS Nizam Zachman Jakarta kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan sebesar ... % pertahun. Secara rinci, perkembangan jumlah kapal berpangkalan dan memanfaatkan kolam PPS Nizam Zachman Jakarta adalah sebagai berikut :

4. Tingkat Kinerja Pelabuhan

Merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

Nilai tingkat kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan sebesar ... % pertahun. Secara rinci, perkembangan nilai tingkat kinerja di PPS Nizam Zachman Jakarta adalah sebagai berikut :

C. Lingkungan Strategis

Pembangunan perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya akan dielaborasi pada konteks lingkungan strategis internal maupun eksternal, untuk selanjutnya sekaligus dianalisis berbagai alternatif dasar arah kebijakannya.

Secara khusus, proses identifikasi akan ditelaah sampai pada lingkup kegiatan. Metode SWOT akan digunakan sebagai dasar analisis agar proses telaah dapat dielaborasikan ke dalam lingkungan strategis, sekaligus untuk mempermudah permusan alternatif arah kebijakan.

Sebagai jembatan yang menghubungkan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta yang telah ditetapkan dengan strategi, kebijakan dan program pembangunan yang akan ditempuh maka perlu diawali dengan analisis lingkungan strategis yang senantiasa berkembang dinamis. Analisis dimaksud mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, dimana masing-masing analisis ditinjau dari tiga aspek utama, yakni sosial, ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal, maka dapat diketahui unsur-unsur kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Keempat unsur tersebut harus dapat dianalisa untuk menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

1. Faktor Internal

a) Kekuatan

Dengan memperhatikan stakeholders dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta memiliki kekuatan yang dijabarkan sebagai berikut :

- Lokasi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta cukup strategis sebab dekat dengan WPP 572, 573 dan 711 yang merupakan fishing ground ikan pelagis seperti Cakalang dan Tuna serta mudah dalam melakukan ekspor melalui transportasi udara (Bandara Soetta dan Halim Perdana Kusuma) dan transportasi laut (Pelabuhan Tanjung Priok).
- Akses ke dan dari Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta mudah dan terbuka akses transportasi 24 jam.
- Luas kawasan pelabuhan perikanan sebesar 110 Ha, yang terdiri dari kolam pelabuhan sebesar 40 Ha dan luas daratan sebesar 70 Ha.
- Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta telah memiliki WKOPP yang direkomendasi Gubernur DKI Jakarta dan penetapan WKOPP oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Kapal perikanan yang berpangkalan dan memanfaatkan pelabuhan di dominasi kapal perikanan diatas diatas > 50 GT.
- Kawasan pelabuhan perikanan telah berdiri industri/perusahaan perikanan tangkap/ UPI dengan skala besar serta usaha pendukungnya.
- Penyerapan tenaga kerja/SDM di pelabuhan perikanan sangat banyak hingga diatas 50.000 orang.
- Pelabuhan perikanan memiliki tempat pemasaran dan distribusi hasil perikanan melalui Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru.
- Potensi PNBK di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di atas 30 Milyar.

b) Kelemahan

Disamping kekuatan yang dimiliki, analisis terhadap lingkungan internal juga memperhatikan unsur-unsur kelemahan yang harus dipertimbangkan antara lain :

- Luas kolam pelabuhan yang terbatas, sehingga kapal perikanan terjadi over capacity sehingga susah untuk dilakukan pengawasan dan berpotensi terjadi kecelakaan dan kebakaran.
- Keterbatasan anggaran pelabuhan perikanan untuk melakukan perbaikan/ rehabilitasi fasilitas pelabuhan yang sudah mengalami kerusakan.
- Kurangnya budaya bersih dan tertib ABK/ pengguna pelabuhan dikawasan pelabuhan perikanan.

2. Faktor Eksternal

a) Peluang

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pembangunan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta adalah sebagai berikut :

- Tumbuh dan berkembangnya iklim usaha sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mendorong peningkatan investasi di wilayah DKI Jakarta.
- Semakin menguatnya nilai mata uang asing terhadap rupiah akan mendorong pengembangan ekspor dan peningkatan devisa.
- Semakin meningkatnya pangsa pasar produk perikanan baik lokal maupun internasional, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mengkonsumsi produk pangan yang bergizi dan menyehatkan.

b) Tantangan

- Kebijakan pemerintah dalam penentuan harga BBM yang belum berpihak pada nelayan dan industri perikanan.
- Adanya duplikasi peraturan dan beragamnya jenis pungutan perikanan yang menghambat pengembangan usaha perikanan.
- Maraknya IUU Fishing diperairan teritorial dan ZEEI.
- Gangguan keamanan dan lemahnya penegakan hukum di laut.
- Semakin meningkatnya akses produk-produk asing terhadap pasar dalam negeri sebagai konsekuensi dari pelaksanaan perdagangan bebas. Hal ini menyebabkan persaingan produk-produk perikanan menjadi semakin ketat.

- Usaha perikanan masih didominasi nelayan kecil dan pemanfaatan yang bertumpu pada perairan pantai.
- Masih rendahnya kemampuan masyarakat menyerap informasi yang ada di Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan.
- Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perikanan khususnya nelayan yang bisa dilihat dari rendahnya tingkat pendidikannya menyebabkan proses alih teknologi dan ketrampilan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga berdampak pada kemampuan pengembangan usaha.
- Masih rendahnya mutu hasil perikanan yang menyebabkan nilai jual produk perikanan menjadi rendah.
- Resistensi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan (perikanan) yang semakin meningkat.

D. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 2021, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, danf atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penudang Perikanan. Dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain :

1. Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-Undang RI No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
3. Undang-Undang RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
4. Undang-Undang RI No.18 Tahun 2008 tentang Sampah.
5. Undang-Undang RI No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
8. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut.

9. Peraturan Pemerintah RI No.85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Peraturan Pemerintah RI No.49 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan.
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP di Luar Pemanfaatan SDA Perikanan.
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.27/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan.
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.48/PERMEN-KP/2014 tentang Logbook Penangkapan Ikan.
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
21. Keputusan Menteri No 52A/MEN/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.
22. Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap, KKP No.18/DJPT/2009 tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Sebagai Lokasi Penerapan Ketentuan Port State Measures;
23. Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap, KKP No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Perdirjen Perikanan Tangkap No. 4 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan PNPB di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan.

24. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No KEP.84/PER-DJPT/2013 Tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan.

E. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
2. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
3. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
4. pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
5. pelaksanaan pelayanan berlayar;
6. penerbitan persetujuan pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
7. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
10. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
11. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
12. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;

13. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
14. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
15. pelaksanaan urusan ketatausahaan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dijabarkan dalam susunan organisasi dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. **Subbagian Umum**; mempunyai melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. **Kelompok Jabatan Fungsional**; mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

F. Maksud dan Tujuan

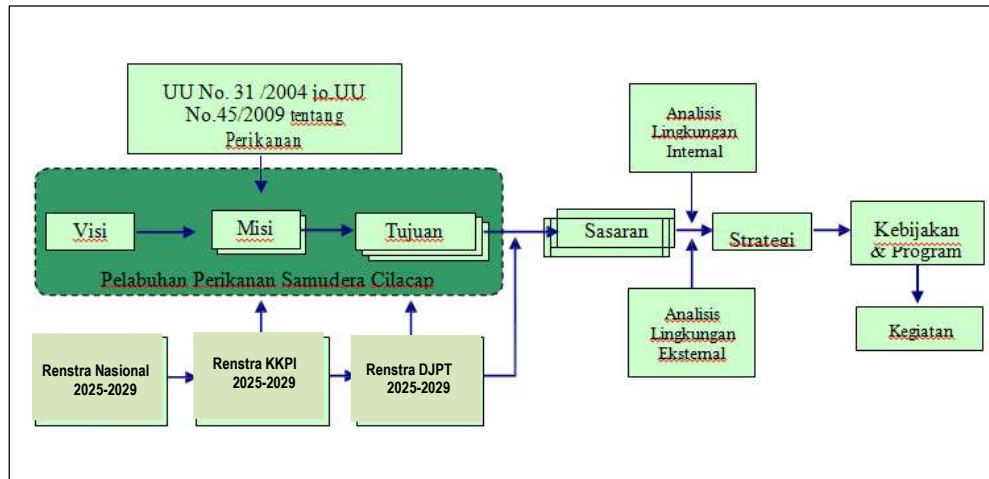
Dengan mempertimbangkan dinamika tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan langkah strategis untuk menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat, melalui penjabaran kebijakan secara berjenjang.

Maksud dan tujuan adanya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tahun 2025-2029, adalah merupakan arah dan pedoman pengembangan dan operasional guna mencapai hasil yang diinginkan dalam periode kurun waktu 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dalam pelaksanaannya Rencana Strategis dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis dimaksud diuraikan kedalam program dan kegiatan dengan memperhitungkan peluang, tantangan, ancaman dan hambatan yang mungkin timbul.

Rencana Strategis tersebut juga merupakan komitmen organisasi dan sekaligus diharapkan mampu memberikan motivasi dan petunjuk kepada stakeholders yang terlibat dalam aktifitas operasional pelabuhan.

D. Alur Pikir

Alur pikir penyusunan Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tersaji pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.3. Alur Pikir Penyusunan Renstra PPS Nizam Zachman Jakarta

BAB II.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk "Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong".

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. **Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni :**
 - a. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat
 - b. Inovasi dan Riset KP menguat
2. **Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni :**
 - a. Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal.
 - b. Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat.
 - c. Pengawasan pengelolaan SDKP.

- d. Sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat.
- e. Pengelolaan ruang laut optimal.
- 3. **Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni :**
 - a. Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
- 4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP,yakni:**
 - a. Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat

B. Pembangunan Perikanan Tangkap

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

DJPT melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- 1. peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap;
- 2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi subsektor perikanan tangkap;
- 3. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap; dan
- 4. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT.

Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi DJPT, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:

- 1. Peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan.
- 2. Peningkatan kontribusi ekonomi subsektor perikanan tangkap, yaitu:
 - a) Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan;
 - b) Mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif; dan
 - c) Mengakselerasi reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan

tangkap

3. Peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI; dan
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

Visi PPS Nizam Zachman Jakarta

Visi PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2025-2029 adalah Visi PPS Nizam Zachman Jakarta yaitu "Terwujudnya Perikanan Tangkap yang maju dan berkelanjutan serta Masyarakat perikanan tangkap yang mandiri dan Sejahtera untuk mewujudkan Indonesia Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Misi

PPS Nizam Zachman Jakarta melaksanakan 2 (dua) Misi yaitu :

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Sasaran Program

Dalam mencapai visi dan misi PPS Nizam Zachman Jakarta menetapkan sasaran program yaitu kondisi yang ingin dicapai PPS Nizam Zachman Jakarta sebagai suatu outcome/impact dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pelabuhan perikanan. Pada tahun 2025-2029, PPS Nizam Zachman Jakarta menetapkan 5 (lima) sasaran program, yaitu:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.
2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta meningkat, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta yang berdaya saing, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - Persentase Permohonan Perusahaan Yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

- Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.
 - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.
 - Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.
 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.
4. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
- Kapal Perikanan Izin Daerah Yang Memenuhi Ketentuan.
 - Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan.
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
- Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.
 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.
 - Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.
 - Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.
 - Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.
 - Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.
 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.
 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Indikator kinerja Tahun 2025-2029 Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta telah ditetapkan sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 4.1 Matrik Target Indikator Kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025-2029

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8
SS1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Rp juta)	27.676,40	28.506,69	29.361,89	30.242,74	31.150,03
SS2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Ton)	270,58	278,69	287,06	295,67	304,54
SS3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta yang berdaya saing	3	Persentase Permohonan Pengusahaan Yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	100	100	100	100	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	87	87	87	88	88
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	84	84	84	86	86

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8
SS3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta yang berdaya saing	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	90	90	90	92	92
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	30	30	30	35	35
SS4	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di	8	Kapal Perikanan Izin Daerah Yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	976	976	976	980	980
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26	0,26	0,26	0,30	0,30
SS5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	10	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	46	75	75	78	78
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	85	85	85	86	86
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	88	88	88	89	89
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Indeks)	87	87	87	88	88
		14	Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	76	76	76	77	77

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
SS5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	15 Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	81	81	81	82	82
		16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	92	92	92	93	93
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	72	72	72	73	73
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	89	89	89	90	90

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025-2029, maka diperlukan pendanaan baik dari APBN. Adapun kegiatan dan anggaran Tahun 2025-2029 Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta untuk Program Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rencana Pendanaan Kegiatan dan Anggaran di PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025-2029

No	Program/Kegiatan (Output)	Alokasi Anggaran (Juta Rupiah)					Lokasi
		2025	2026	2027	2028	2029	
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	6.792,4	6.900,0	6.950,0	7.100,0	7.250,0	
HB.2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	6.792,4	6.900,0	6.950,0	7.100,0	7.250,0	
BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	5.572,2	5.600,0	5.600,0	5.700,0	5.800,0	Jakarta
BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	5.572,2	5.600,0	5.600,0	5.700,0	5.800,0	

No	Program/Kegiatan (Output)	Alokasi Anggaran (Juta Rupiah)					Lokasi
		2025	2026	2027	2028	2029	
QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	1.209,5	1.300,0	1.350,0	1.400,0	1.450,0	Jakarta
QGA.002	Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1.209,5	1.300,0	1.350,0	1.400,0	1.450,0	
HB.2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	10,7	15,0	15,0	20,0	20,0	
QKB	Pemantauan produk	10,7	15,0	15,0	20,0	20,0	Jakarta
QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	10,7	15,0	15,0	20,0	20,0	
WA	Program Dukungan Manajemen	36.989,3	43.147,0	45.983,0	49.873,3	53.294,0	
WA.2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	36.989,3	43.147,0	45.983,0	49.873,3	53.294,0	
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	876,2	880,0	880,0	880,0	880,0	Jakarta
CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikas	876,2	880,0	880,0			
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	23.990,0	30.075,0	32.406,0	35.283,3	38.199,0	Jakarta
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	20,0	40,0	40,0	50,0	50,0	
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	13,0	15,0	20,0	20,0	25,0	
EBA.994	Layanan Perkantoran	23.957,0	30.020,0	32.346,0	35.213,3	38.124,0	
001	Gaji dan Tunjangan	11.545,7	16.520,0	17.346,0	18.213,3	19.124,0	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12.411,3	13.500,0	15.000,0	17.000,0	19.000,0	
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11.937,0	12.000,0	12.500,0	13.500,0	14.000,0	Jakarta
EBB.951	Layanan Sarana Internal	8.357,0	4.000,0	4.000,0	4.500,0	4.500,0	
EBB.971	Layanan Prasarana Internal	3.580,0	8.000,0	8.500,0	9.000,0	9.500,0	
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	20,0	25,0	30,0	30,0	35,0	Jakarta
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	20,0	25,0	30,0	30,0	35,0	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	166,1	167,0	167,0	180,0	180,0	Jakarta
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	63,0	63,0	63,0	65,0	65,0	
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	39,0	39,0	39,0	45,0	45,0	
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	64,1	65,0	65,0	70,0	70,0	
	TOTAL	43.781,7	50.047,0	52.933,0	56.973,3	60.544,0	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025–2029 merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Ditjen Perikanan Tangkap, sehingga penyusunan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Ditjen Perikanan Tangkap. Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Ditjen Perikanan Tangkap juga dihasilkan berkat adanya dukungan seluruh jajaran pegawai pelabuhan, instansi terkait dan stakeholder dikawasan pelabuhan perikanan. Kerja keras dari seluruh pimpinan dan staf Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Ditjen Perikanan Tangkap dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Ditjen Perikanan Tangkap yang tertuang dalam Rencana Strategis ini.